BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agen, dimana pemilik perusahaan atau investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam sebuah perusahaan *go publik* pemegang saham sebagai pemilik (*principal*) mendelegasikan wewenang pengelolaan kegiatan perusahaan kepada manajer (*agen*) dimana manajer harus memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi yang berkaitan tentang perusahaan kepada pemegang saham. Oleh sebab itu teori agensi mendasari diperlukannya pengungkapan informasi yang dalam hal ini pengungkapan secara sukarela berkaitan dengan perusahaan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penyampaian informasi pendukung berkaitan dengan perusahaan dari pihak manajemen sebagai pengelola kepada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan (Indriani, 2014).

Masalah keagenan mungkin timbul saat pihak pemilik informasi yang dalam hal ini merupakan manajemen mementingkan kepentingan sendiri sehingga enggan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham dengan menyampaikan informasi (Agustina, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan hubungan teori agensi dengan judul yang peneliti tulis menjelaskan bahwa teori agensi juga mengimplikasikan terjadinya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dengan pemilik yang dalam hal ini merupakan pemegang saham/investor, dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak dan akurat daripada pemegang saham, sehingga manajer akan cenderung ingin menyampaikan kondisi perusahaan yang baik. Sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi secara luas.

2. Teori Persinyalan (*signalling theory*)

Teori signaling pada dasarnya merupakan penggunaan laporan keuangan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada para pemakainya. Penyampaian sinyal oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan memberikan segala informasi mencakup keuangan dan non keuangan yang transparan (Indriani, 2014).

Pemberian informasi yang transparan dapat dilakukan dengan cara pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat sukarela. Pengungkapan yang lengkap dan transparan merupakan sinyal-sinyal dari perusahaan kepada pengguna informasi keuangan yang dapat berpengaruh terhadap keputusan bisnis yang akan diambil. Informasi perusahaan terangkum dalam laporan tahunan perusahaan yang pada umumnya dipublikasikan kepada publik, sehingga laporan tahunan menjadi penting bagi pihak eksternal perusahaan (Andayani, 2002).

Berdasarkan penjelasan diatas, hubungan teori signalling dengan judul yang peneliti tulis menjelaskan bahwa semakin kuat finansial suatu perusahaan, maka cenderung akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dari pada perusahaan yang kondisi finansialnya lemah, sebagai suatu sinyal keberhasilan manajemen dalam mengelola finansial perusahaan tersebut.

3. Asimetri Informasi

Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. (Sering juga disebut dengan istilah *informasi asimetrik*/informasi asimetris). Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Fanani (2009) yang mendefinisikan asimetri informasi sebagai kondisi dimana adanya perbedaan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder yang tidak memiliki informasi karena sebagai pengguna informasi (*user*).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan

insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

Ada dua tipe asimetri informasi :

a. Adverse Selection

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

b. Moral Hazard

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

4. Luas Pengungkapan

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas pengungkapan (Supriadi, 2010).Kualitas pengungkapan yang baik yang dalam hal ini berupa kemampuan dalam memberikan dan menyampaikan

informasi yang lebih baik sebagai dasar pengambilan keputusan.Kualitas pengungkapan tersebut dapat melalui pengungkapan informasiyang transparan pada laporan tahunan perusahaan (Indriani dkk., 2014).

Kebutuhan banyaknya informasi tergantung pada keahlian pembaca laporan keuangan tetapi informasi juga harus memenuhi kriteria pengungkapan (Supriadi, 2010). Kriteria pengungkapan tersebut anatara lain :

a. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

   Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

   Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

   Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan.Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Hal ini dikarenakan pengungkapan secara rinci serta terlalu banyak akan menimbulkan kemungkinan

mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsirkan.

Transparansi dalam laporantahunan (*annual report*) menyangkut pengungkapan informasi tentang suatu keadaan seperti adanya. Ada dua sifat pengungkapan yaitu :

a. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

   Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM.

b. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

   Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu pengungkapan yang bersifat sukarela dilaksanakan perusahaan dimana pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen dengan pertimbangan kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna informasi keuangan terkait dengan aktivitas-aktivitas perusahaan.

5. Pengungkapan Informasi Sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dapat dengan leluasa dilakukan perusahaan sesuai kepentingan perusahaan yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi yang akan dilakukan oleh pengguna informasi tahunan (*annual report*).

Sedangkan pengungkapan sukarela dalam SAK No.1 paragraf 12 (IAI, 2009) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi sukarela merupakan Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporankeuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilaitambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan pentingdan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna informasi yang memegang peranan penting.Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Porsi Kepemilikan Saham Publik Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela, yang dimaksud dengan kepemilikan perusahaan adalah saham yang dimiliki oleh publik atau sejumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat (Indriani,2014). Sutomo (2004) menyatakan bahwa semakin besar porsi kepemilikan publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi yang mendetail yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan (*annual report*). Semakin besar pembagian saham yang dimiliki oleh publik, maka akan memicu perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara sukarela yang lebih

luas, karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang perusahaan dalam pertimbangan berinvestasi serta mengawasi kegiatan manajemen.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Porsi kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

2. Pengaruh Umur *Listing* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

Umur *listing* perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan go publik. Hubungan umur perusahaan dengan luas pengungkapan dapat diasumsikan bahwa semakin lama perusahaan menjadi perusahaan publik, maka diharapkan perusahaan semakin memahami kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin panjang umur *listing* perusahaan akan memberikan pengungkapan lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang umurnya lebih pendek karena, perusahaan tersebut memiliki pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan pengalaman lebih dalam (Indriani,2014).

Prayogi (2003) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.Kondisi tersebut dikarenakan, perusahaan yang memiliki umur lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman dalam mempublikasi laporantahunan (*annual report*) perusahaan.

Jadi, Semakin panjang atau lama umur *listing* perusahaan, maka perusahaan akan lebih banyak memberikan informasi yang lebih detail. Sehingga perusahaan tersebut memiliki informasi yang baik untuk dipublikasikan.

Berdasarkn uraian diatas, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Umur *listing* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

Tingkat likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang menggambarkan tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Pada penelitian ini pengukuran tingkat likuiditas perusahaan diproksikan dengan rasio lancar, yaitu dengan membandingkan aktiva lancar dan hutang lancar yang dimiliki perusahaan (Indriani,2014).

Menurut Alsaeed (2006), perusahaan menikmati posisi keuangan yang sehat. Kekuatan perusahaan yang ditunjukkan rasio likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan yang tinggi (Alsaeed, 2006). Pernyataan tersebut didukung oleh teori signalling yang menjelaskan bahwa semakin kuat finansial suatu perusahaan, maka cenderung akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dari pada perusahaan yang kondisi finansialnya lemah, sebagai suatu sinyal keberhasilan manajemen dalam mengelola finansial perusahaan tersebut.

Beberapa penelitian yang mendukung pernyataan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Subiyantoro (1998), Suripto (1999), dan Simanjuntak dan Widiastuti (2004) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat likuiditas dan luas pengungkapan informasi sukarela.

Namun, pendapat berbeda diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alsaeed (2006) yang menemukan bahwa terdapat kemungkinan yang terbalik dari pernyataan sebelumnya, yaitu tingkat likuiditas yang rendah mungkin dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat pengungkapan informasi untuk mengurangi ketakutan dan memberitahu kepada pemegang saham bahwa manajemen menyadari adanya masalah. Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwata (2001), Yuliansyah dan Yenny (2007), dan Almilia dan Retrinasari (2007). Jadi, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka akan berhubungan positif dengan luas pengungkapan informasi, dikarenakan dengan likuiditas yang tinggi berarti perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Sehingga perusahaan akan mngungkapkan informasi seluas-luasnya.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, muncul pertanyaan empiris tentang pengaruh tingkat likuiditas terhadap luas pengungkapan. Maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H_3: Tingkat likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

4. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

Profesi Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan profesi kepercayaan masyarakat yang diperlukan perusahaan untuk menilai keandalan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangnnya. Penggunaan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) juga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sukarela (Indriani,2014). Menurut Benardi (2009) ukuran KAP *The Big Four* yang mengaudit perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan perusahaan. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP yang termasuk dalam *The Big Four* dianggap lebih berkualitas dalam pengungkapannya. Perusahaan yang menggunakan Kantor Akuntan Publik yang besar, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang berkualitas akan diinterpretasikan oleh publik bahwa perusahaan memiliki informasi yang tidak menyesatkan dan telah mengungkap informasi setransparan mungkin (Sutomo, 2004). Manajemen mengeluarkan laporan keuangan tahunan diperiksa dan dinilai oleh auditor sebagai pihak luar yang independen.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kantor akuntan publik yang memeriksa laporan tahunan perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki informasi laporan tahunan yang

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan tidak menyesatkan. maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_4: Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

Penelitian terhadap variabel kepemilikan manajerial dihubungkan dengan teori keagenan. Pemisahan kepemilikan dan fungsi pengendalian dipertimbangkan oleh para peneliti dan praktisi sebagai penyebab utama dari konflik yang terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah agensi muncul ketika pemilik (*principal*) mempekerjakan seorang manajer (agen) untuk menjalankan perusahaan tetapi manajer tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajer untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Menurut Juhmani (2013), dalam rangka menyelaraskan kepentingan antara pemilik dan agen (manajer), solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sebagian saham perusahaan kepada manajer. Ketika manajer menjadi bagian dari pemegang saham perusahaan, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menyebabkan naiknya kekayaan pemegang saham. Peningkatan kekayaan pemegang saham pada akhirnya juga akan menyebabkan kekayaan manajer naik. Oleh karena itu, pengungkapan

informasi meningkat karena manajer sebagai pemegang saham dalam jumlah besar dapat memperoleh keuntungan dari harga pasar saham yang tinggi, yang diperoleh dengan cara menurunkan biaya agensi yang harus ditanggung oleh perusahaan melalui pengungkapan informasi yang lebih baik. Ketika manajer memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik perusahaan (investor), maka manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi.

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham sehingga biaya agensi dapat menurun (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik agensi dapat berkurang karena adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut Barros, *et al*. (2013) manajer dengan kepemilikan yang tinggi memiliki sedikit dorongan untuk melakukan tindakan demi keuntungan pribadinya. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin besar kemauan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Para manajer akan mengungkapan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi yaitu biaya pengawasan yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah terjadinya masalah agensi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

6. Pengaruh Luas Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Asimetri Informasi Perusahaan.

Benardi, dkk. (2009) menyatakan asimetri informasi bisa berkurang bila perusahaan melakukan kebijakan pengungkapan yang luas (*extent disclosure*). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Botosan (1997) serta Bloomfield dan Wilks (2000) bahwa semakin komprehensif atau tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan maka akan memperkecil asimetri informasi.

Penelitian Benardi, dkk. (2009) menemukan bahwa luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Jadi, semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin kecil asimetri informasi yang terjadi antara perusahaan dan investor.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam adalah sebagai berikut:

H_7: Luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi.

C. Model Penelitian

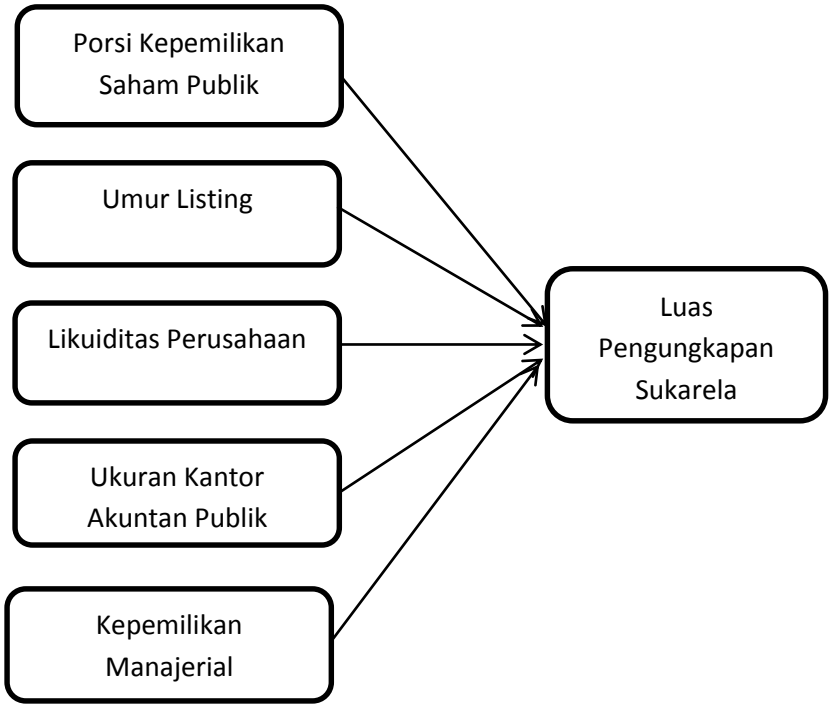

Gambar 1

Model Penelitian Pertama

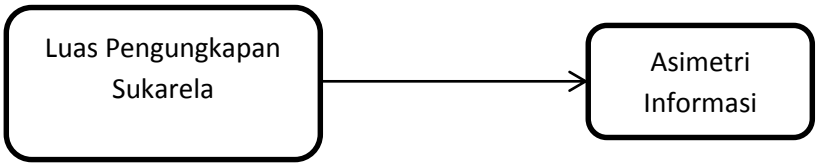

Gambar 2

Model Penelitian Kedua